

Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap)

Luthfi Hidayat Maulana¹, Andi Hendrawan²

Dosen Universitas Peradaban¹, Dosen Akademi Maritim Nusantara²
Luthfihidayat578@gmail.com

Abstract: *A coastal area is a transition area between sea and land. The development of the coastal area is influenced by the pressure of human activities and phenomena that occur both on land and sea. The condition is illustrated in the Kutawaru Beach, Bantul District. Kutawaru Beach has a unique nature mainly the pine trees and culinary. However, the behavior of people may endanger the natural condition at this area. The aim of this study is to examine the behavior of coastal communities relates to the environmental damage in Kutawaru Beach and the impact on social and economic aspect. A mixed method was applied by using sequential explanatory design. Selection of the sample is completed by purposive sampling on government and fishermen groups. The results show that the behavior of coastal communities has lead to the environment degradation and it is very influential in decreasing the welfare of society. This research also found that the people's behavior is very much influenced by the little level of education and low awareness on the coastal region of Kutawaru Beach. Local government should work together with the local community to save Kutawaru Beach from environmental damage caused by the behavior of the people themselves.*

Keywords: *Coastal Communities, Behavior, Environmental Damage*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait dengan wilayahnya seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai dengan 200 mil dari garis

pangkal. Sehingga wajar apabila sekarang ini wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan sasaran dan harapan baru dalam memenuhi kesejahteraan rakyat (Mallewai, 2013).

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang terakhir telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wilayah daerah propinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan: sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam

merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah itu sendiri (Muttaqiena, 2009).

Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara Mega Biodiversity dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan Transisi antara daratan dan lautan yang membentuk ekosistem beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia (Mallewali, 2013).

Namun semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir serta berbagai peruntukan seperti pemukiman, perikanan, pelabuhan, objek wisata dan lain-lain, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem sumberdaya pesisir dan laut ini semakin meningkat. Sehingga Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya menjadi rusak dan mengakibatkan berbagai macam pencemaran seperti; pencemaran air laut akibat pembuangan sampah di laut dan air limbah di laut, matinya trumbuk karang, abrasi, dan berbagai macam aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan sehingga dari dampak tersebut dapat mengakibatkan gangguan masalah kesehatan yang ada seperti kesehatan berbasis lingkungan (Mallewali, 2013).

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun di laut. Fenomena yang terjadi di daratan antara lain abrasi, banjir dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pembangunan permukiman, pembabatan hutan untuk

persawahan, pembangunan tambak dan sebagai yang pada akhirnya memberi dampak pada ekosistem pantai. Demikian pula fenomena-fenomena di lautan seperti pasang surut air laut, gelombang badai dan sebagainya (Hastuti, 2012).

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan kepebisiran, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, watak masyarakat, serta tekanan biaya hidup menyebabkan masyarakat pesisir sering melakukan perusakan lingkungan pesisir (Primyastanto *et al*, 2010). Hal ini diperkuat bahwa kerusakan pesisir lebih dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia (Gumilar, 2012). Hiariey *et al* (2013) menambahkan tingkat pendidikan, persepsi dan pendapatan mempengaruhi kepentingan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir. Pengaruh pendapat masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari mekanisme yang menghasilkan perilaku yang nyata dari masyarakat itu sendiri dalam menciptakan perubahan dalam lingkungan mereka (Heddy, 1994). Adanya interaksi antara manusia dengan alam juga menyebabkan degradasi eksosistem (Vatria, 2010).

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan mengalami kerusakan. Dampaknya akan sangat terasa oleh masyarakat yang menghuni wilayah pesisir dimana hal ini akan berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan pada sumber daya pesisir. Salah satu cara yang perlu dilakukan mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna memunculkan kesadaran perlu diberikan karena akan menjamin terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fitriansah, 2012). Langkah konservasi pesisir dengan melibatkan masyarakat merupakan kunci

keberhasilan pelestarian pesisir yang berkelanjutan yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Wardhani, 2011).

Pesisir pantai Desa Kampung Laut sebagai lokasi penelitian terletak di Desa Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, sekitar 1 jam perjalanan menggunakan perahu dari Kota Cilacap. Sebagai salah satu objek wisata pantai, Desa Kutawaru memiliki keindahan alam yang tidak dapat ditemui pada pantai-pantai lain di pesisir selatan Cilacap. Desa Kutawaru memiliki potensi hutan mangrove yang eksotis. Selain memiliki daya tarik wisata, pohon mangrove di sekitar Kutawaru juga bermanfaat untuk menahan ombak pada saat tsunami. Keberadaan Pantai Kutawaru menjadi sumber mata pencaharian lain bagi para nelayan di daerah sekitarnya. Kelompok nelayan di Kutawaru yang telah lama berdiri menjadi peluang utama dalam menggali potensi pantai Kutawaru secara lebih luas dan humanis. Meskipun memiliki potensi alam berupa mangrove yang tidak terdapat di pantai-pantai lainnya, perilaku masyarakat pesisir sekitar Kutawaru seperti menebang mangrove untuk membuat tambak, akan menyebabkan kerusakan lingkungan Pantai Kutawaru. Selain berdampak negatif pada lingkungan, seperti hilangnya potensi alam, perilaku buruk tersebut juga berdampak pada sosial, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk dan ekonomi, seperti menurunnya pendapatan karena secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan di Pantai Kutawaru. Padahal potensi yang dimiliki oleh Pantai Kutawaru patut dilestarikan dan dikembangkan, baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian “Bagaimana perilaku masyarakat pesisir di Pantai Kutawaru

yang mengakibatkan kerusakan lingkungan?”

Tinjauan Pustaka

Pengertian Perilaku

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku terdiri dari persepsi (perception), respon terpimpin (guided respon), mekanisme (mechanisme), dan adopsi (adoption) (Notoatmodjo, 2003). Setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda tergantung dari bagaimana manusia atau individu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk itu, kondisi lingkungan menentukan perilaku manusia, dimana lingkungan akan menentukan bagaimana seseorang merespon kondisilingkungan yang dihadapi. Perilaku manusia terbagi atas dua macam, yaitu perilaku yang prosesnya telah direncanakan dalam kelompok dan merupakan milik dirinya tanpa belajar seperti refleksi, kelakuan naluri, dan kelakuan membabi buta, serta perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam kelompok tetapi yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990). Dalam berperilaku, seseorang dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan pranata sosial yang dijamin oleh sistem nilai dan norma yang dianut dan berlaku bagi masyarakat baik secara lisan maupun tulisan (Thoha, 1982).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods). Penelitian campuran adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh data yang lebih komprehensif,

valid, reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 2012). Melalui metode penelitian campuran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui kajian perilaku masyarakat pesisir di Pantai Kutawaru yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara, kuesioner dan observasi lapangan. Sedangkan metode sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Melalui metode sampling tersebut, peneliti memilih lima puluh responden masyarakat sekitar Pantai Kutawaru yang berkaitan langsung dengan lokasi penelitian dan mengetahui mengenai Pantai Kutawaru.

Peneliti juga memilih lima responden dari instansi atau pemerintah yang mengetahui tentang Pantai Kutawaru, meliputi Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, dan tokoh masyarakat Desa Poncosari. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis Sequential Explanatory Design. Melalui metode analisis tersebut, pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data dan analisis data dengan kuantitatif. Lalu pada tahap kedua dilakukan pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan di tahap pertama. Dengan metode analisis tersebut, peneliti berupaya untuk menjabarkan data dan informasi melalui uraian sistematis untuk mengetahui perilaku masyarakat pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya dari kajian perilaku masyarakat tersebut dinilai baik buruknya perilaku masyarakat berdasarkan norma atau aturan yang ada di pesisir Pantai Kutawaru.

Perilaku Masyarakat Pesisir

Tindakan manusia terhadap lingkungan dilakukan berdasarkan keputusan yang berasal dari persepsi yang bersumber atas dua hal penting tentang perilaku manusia yaitu: (1) perilaku yang merupakan fungsi dari orang dan situasinya, (2) orang tidak hanya akan beraksi pada ciri objektif suatu aktivitas, tetapi juga pada penafsiran objektif sendiri dengan kata lain sikap merupakan komponen kognitif yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu terhadap obyek (Abdurahman, 1990). Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, perilaku manusia dapat menentukan keberlanjutan kondisi lingkungan. Perilaku pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerangka pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pendekatan keterpaduan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. Zamlawi (1997) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi (1) penataan, (2) pemanfaatan, (3) pemulihan, (4) pengawasan, dan (5) pengendalian yang terus menerus dilakukan untuk pelestarian keseimbangan ekologi lingkungan. Keseimbangan ekologi akan menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Karakteristik Masyarakat Kawasan Pesisir Secara umum kondisi aktivitas masyarakat pesisir meliputi aktivitas ekonomi berupa kegiatan perikanan yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan laut terbuka; kegiatan pariwisata dan rekreasi yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan

objek di bawah air; kegiatan transportasi laut yang memanfaatkan lahan darat dan alokasi ruang di laut untuk jalur pelayaran, kolam pelabuhan dan lain-lain; kegiatan industri yang memanfaatkan lahan darat; kegiatan pertambangan yang memanfaatkan lahan darat dan laut; kegiatan pembangkit energi yang menggunakan lahan darat dan laut; kegiatan industri maritim yang memanfaatkan lahan darat dan laut, pemukiman yang memanfaatkan lahan darat untuk perumahan dan fasilitas pelayanan umum; dan kegiatan pertanian dan kehutanan yang memanfaatkan lahan darat. Aktivitas ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketergantungannya terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lembaga sosial aktivitas, ekonomi pendidikan, kesehatan dan lain-lain (Bengen, 2002).

Analisis Analisis Karakteristik Mata Pencaharian Masyarakat di Pantai Kutawaru

Analisis Karakteristik Petani di Sekitar Pantai Kutawaru

Sebagian besar masyarakat Desa Kutawaru bekerja di sektor pertanian. Namun, keberadaan tambak udang di sekitar Pantai Kutawaru mengganggu tanaman pertanian milik warga. Ini dikarenakan udara di sekitar tambak mengandung garam sehingga akan berpengaruh terhadap lahan pertanian di sekitarnya, dimana pertanian tidak dapat tumbuh. Tanaman warga, seperti padi dan palawija menjadi sulit tumbuh karena uap air yang mengandung garam. Dalam mengatasi masalah tersebut, belum ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Daerah Pembangunan

(BAPPEDA) telah melakukan negosiasi dengan para petambak agar menutup tambak yang merusak lingkungan Pantai Kutawaru karena aktivitas tambak yang ada di pesisir pantai selatan dapat mengganggu aktivitas pariwisata dan pertanian.

Analisis Karakteristik Nelayan di Pantai Kutawaru

Sebagian masyarakat di Pantai Kutawaru memiliki tambak udang. Usaha tambak udang di Pantai Kutawaru cukup menjanjikan karena hasil melaut yang tidak menentu akibat gelombang laut dan cuaca yang mempengaruhi hasil tangkapan. Setelah adanya salah seorang warga yang mencoba untuk berwirausaha dibidang tambak udang dan berhasil, maka petani dan nelayan di daerah Pantai Kutawaru mengambil alternatif lain untuk berwirausaha di bidang tambak udang. Banyak petani dan nelayan yang meminjam uang di bank untuk membangun kolam udang dan modal membeli benih udang. Namun, muncul permasalahan bahwa dalam upaya pembuatan kolam tambak udang harus menebang pohon cemara di sekitar pantai. Sebagai dampaknya, ancaman abrasi air laut semakin besar.

Analisis Perilaku Masyarakat yang Merusak Pantai Kutawaru

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Pantai Kutawaru disebabkan oleh perilaku masyarakat di sekitar pantai. Pantai Kutawaru pada awalnya telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan program promosi Pantai Kutawaru keluar dari Kabupaten Bantul. Namun begitu, dalam perjalanannya muncul permasalahan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang membagi tanah di pesisir Pantai Kutawaru menjadi beberapa petak untuk digunakan sebagai lahan tambak

udang. Upaya pembukaan lahan baru untuk usaha tambak udang tersebut merusak lingkungan, dimana masyarakat menebang pohon mangrove, pohon akasia dan pohon leresidi yang telah ada di pesisir Pantai. Selain karena faktor ekonomi, faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sebesar 33% masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga SD. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi kurang dan berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Sebagian masyarakat di sekitar Pantai Kutawaru beranggapan bahwa keberadaan pohon mangrove menyebabkan kerusakan lingkungan oleh abrasi menjadi meningkat. Padahal, menurut fungsinya pohon mangrove adalah penting untuk wilayah pesisir.

Pada awal mula dibukanya Pantai Kutawaru di tahun 2006, keberadaan Pantai Kutawaru dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan berkontribusi terbesar kedua setelah Pantai Parangtritis. Namun pada tahun 2011, kondisi Pantai Kutawaru menurun drastis akibat kerusakan lingkungan yang berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kutawaru mengalami penurunan akibat kondisi pantai yang kurang menarik minat wisatawan karena kondisinya yang panas dan gersang. Kondisi ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian sebagai masyarakat yang membuka jasa dan usaha untuk menunjang sektor pariwisata pantai. Dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat di pantai merupakan konsekuensi dari kegiatan penebangan pohon di kawasan pesisir hingga akhirnya berdampak pada kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi. Secara konseptual, perubahan-perubahan yang terjadi

merupakan akibat munculnya karena proses akulturasi antara perilaku masyarakat sekitar Pantai Kutawaru dengan perilaku luar dari masyarakat Pantai Kutawaru. Dalam proses inilah terjadi saling mempengaruhi antara budaya masyarakat sekitar objek wisata dengan budaya wisatawan. Di dalam proses pengaruh mempengaruhi antara kedua macam kebudayaan yang berbeda itu tampak suatu gejala bahwa orang-orang di sekitar objek wisata dalam perilakunya apat menggunakan sistem penilaian yang berbeda menurut lingkungan sosialnya (Selo, 2009). Perilaku masyarakat di Pantai Kutawaru dapat dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan akhirnya akan mengubah kehidupan sosial dan ekonomi. Ini dikarenakan perubahan perilaku merupakan faktor internal langsung dari masyarakat sendiri dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Pantai Kutawaru. Adapun pengaruh perubahan perilaku terhadap aspek ekonomi masyarakat di Pantai Kutawaru, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat di Pantai Kutawaru dan menurunnya jumlah penjualan kuliner seafood di Pantai Kutawaru diakibatkan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kutawaru menurun. Sementara itu, pengaruh faktor perilaku pengaruh terhadap aspek sosial, yaitu tingkat pendidikan di Pantai Kutawaru masih rendah sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat di Pantai Kutawaru.

Analisis Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kutawaru

Masyarakat di Pantai Kutawaru mempunyai pekerjaan tetap dan sampingan dengan jumlah pendapatan yang bervariasi. Mata pencaharian utama masyarakat Pantai Kutawaru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan,

perikanan dan peternakan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 270 jiwa (61%), nelayan sebesar 110 jiwa (24%), jasa sebesar 110 jiwa (4%), sektor perdagangan sebesar 60 jiwa (8%) dan bangunan sebesar 7 jiwa (3%). Mata pencaharian tertinggi adalah di sektor pertanian karena daerah pesisir Pantai Kutawaru sangat cocok untuk daerah pertanian. Disamping bekerja pada sektor pertanian, beberapa di antara penduduk juga bekerja di sektor pariwisata melalui jasa dan usaha terkait pariwisata, seperti usaha kuliner (40%), usaha souvenir (16%), warung kelontong (14%), penyewaan tikar (10%), dan usaha lainnya (20%). Jumlah pendapatan masyarakat Pantai Kutawaru bervariasi, yaitu kurang dari Rp 750.000,00 hingga lebih dari Rp 4.500.000,00. Persentase terbesar sebesar 30% pendapatan masyarakat berada pada level Rp 751.000,00 hingga Rp 1.500.000,00. Kondisi pendapatan tergantung dari pekerjaan yang digeluti. Dari beberapa mata karakteristik masyarakat di Pantai Kutawaru sektor pariwisata juga sangat banyak karena berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari sektor pariwisata tersebut. Namun begitu, permasalahan yang terjadi adalah bahwa dampak abrasi telah menyebabkan beberapa jenis usaha tersebut terpaksa gulung tikar, terutama untuk para pengusaha warung kuliner. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan

lingkungan di Pantai Kutawaru memberi dampak yang besar pada sektor ekonomi dan sosial. Jenis usaha yang dibuka setiap hari pada kala itu, kini sebagian pedagang lebih memilih untuk menutup usaha mereka dan mereka lebih memilih berjualan pada hari libur saja, seperti usaha kolam renang dan rumah makan kuliner yang rentan terkena abrasi (gambar 3).

Upaya Penyelamatan Pantai Kutawaru dari Kerusakan Lingkungan Dalam upaya penyelamatan Pantai Kutawaru dari kerusakan lingkungan telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan masyarakat lokal Kutawaru melalui penghijauan kembali pesisir pantai yang terkena dampak abrasi. Kegiatan penghijauan dilakukan oleh kelompok nelayan di Pantai Kutawaru dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah menyiapkan bibit pohon magrove dan kelompok nelayan yang melakukan penanaman dan pencangkakan pohon cemara yang masih hidup untuk ditanam kembali. mencangkok pohon cemara yang masih hidup untuk menanam kembali. Beberapa upaya lain juga sedang dilakukan pemerintah, seperti rencana pembuatan talud atau pemecah ombak di Pantai Kutawaru. Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan perilaku yang merusak lingkungan Pantai Kutawaru serta upaya yang sedang dan telah dilakukan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan Pantai Kutawaru.

Tabel 1. Perilaku Masyarakat yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Pantai Kutawaru dan Upaya Penyelamatan Kerusakan Lingkungan Pantai Kutawaru

No.	Perilaku	Persepsi	
		Pemerintah	Masyarakat
1	Penebangan pohon magrove, akasia dan laresidi	a. Pemerintah melarang penebangan pohon magrove, akasia, dan bakau b. Pemerintah bekerja sama	a. Masyarakat telah menebang pohon untuk usaha tambak udang. b. Kelompok nelayan telah melakukan penghijauan

		dengan pihak lain untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang. c. Pemerintah memberikan bibit untuk penghijauan kembali di Pantai Kutawaru	kembali di Pantai Kutawaru. c. Masyarakat masih menunggu bibit tanaman dari pemerintah
2	Tambak Udang	Pemerintah memberikan izin kepada Pengusaha untuk membuat tambak udang. Pemerintah memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk segera menutup tambak udang	Masyarakat mengklaim banyak pengusaha tidak memiliki izin mendirikan tambak udang. Izin baru diberikan beberapa saat kemudian setelah ada komplain dari warga.

Jika dikaitkan dengan pendapat Bengen (2002) mengenai karakteristik masyarakat pesisir bahwa kondisi masyarakat pesisir dipengaruhi ketergantungan masyarakat padalingkungan dan pendidikan dan akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperkuat ungkapan Sulisty (2006) bahwa aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dapat berupa kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian. Perilaku masyarakat pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan menyebabkan menurunnya pendapatan, hilangnya mata pencaharian, dan rusaknya potensi alam sehingga berdampak pada lingkungan dan masyarakat (Thoha, 1982). Stakeholders Mapping Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu masalah, stakeholder dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Berikut adalah penjelasan kedudukan dan fungsi masing-masing stakeholder (Buckles,1999):

- a. Stakeholder Primer Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan, stakeholder primer adalah pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kepentingan langsung pada wilayah pesisir untuk melarang masyarakat di Pantai Kutawaru tidak menebang pohon magrove dan membuka tamabak udang. Pemerintah juga mempunyai rencana untuk menutup semua tambak yang tidak memiliki izin usaha tambak udang.
- b. Stakeholder Sekunder Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu

kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik), tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap keputusan legal pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan, stakeholder sekunder adalah kepala dukuh di Dusun Kutawaru yang memiliki kepentingan langsung dengan kegiatan yang ada di Pantai Kutawaru. Pihak akademisi juga tergolong dalam stakeholder sekunder dimana akademisi mendorong untuk ditanamnya pohon mangrove yang ditanami di pesisir Pantai Kutawaru sehingga bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan.

- c. Stakeholder Kunci Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, masyarakat lokal Kutawaru adalah stakeholder kunci dimana perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi kondisi wilayah pesisir Pantai Kutawaru.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Pantai Kutawaru memiliki potensi alam berupa pohon mangrove yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Namun, perilaku masyarakat sekitar yang buruk, yaitu penebangan pohon mangrove serta keberadaan tambak udang telah merusak kondisi lingkungan pesisir Pantai Kutawaru. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial berupa

tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan di Pantai Kutawaru berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat terutama masyarakat yang memiliki jasa dan usaha penunjang pariwisata Pantai Kutawaru tidak dapat dihindarkan akibat penurunan jumlah wisatawan. Di sisi lain, abrasi di Pantai Kutawaru juga semakin mengancam akibat rusaknya ekosistem pohon mangrove.

Rekomendasi

Dalam meminimalisir kerusakan lingkungan di Pantai Kutawaru, diperlukan integrasi peran dan kerjasama pemerintah, nelayan dan masyarakat di pesisir Pantai Kutawaru. Di sisi lain, diperlukan pula ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di Pantai Kutawaru. Berikut adalah rekomendasi yang diberikan:

1. Melakukan penataan kembali tambak udang yang tidak berizin di Pantai Kutawaru agar pantai Kutawaru memiliki daya saing dengan pantai lain serta dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Melakukan penghijauan melalui penanaman kembali pohon mangrove guna mengurangi kerusakan lingkungan akibat abrasi.
3. Diperlukan peran tokoh masyarakat sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
4. Memberikan batasan kegiatan tambak udang yang dapat dilakukan di pesisir Pantai Kutawaru, baik oleh masyarakat setempat maupun pengusaha tambak.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, R., 2008. Karakteristik Fisik Pantai Karst Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Depok: UI.
- Azhar, R.M., Ernawan, M. & Sulaiman, D.M., 2012. Pagar Geobag Rangka Bambu Sebagai Pelindung Mangrove dan Pehab Pantai Tereosi. In Pertemuan Ilmiah Tahunan XXIX. Bandung, 2012. HATHI.
- Azhar, R.M., Wurjanto, A. & Yuanita, N., 2012. Studi Pengaman Pantai Tipe Pemecah Gelombang Tenggelam di Pantai Tanjung Kait. Disertasi. Bandung: ITB.
- Cahyanto, N.P., Setiyono, H. & Indrayanti, E., 2014. Studi Profil Pantai di Pulau Parang Kepulauan Karimunjawa Jepara. *Jurnal Oseanografi*, 3(2), pp.161-66.
- Fitriansah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat d Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 360-370. Gumilar, I. (2012). Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika*, 3(2), 198-211.
- Hiariey, L. S. & Romeon, N. R. (2013). Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, 14(1), 48-61.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2010. Pedoman Pengaman Pantai In Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Paotonan, C., 2012. Metode Sederhana Penentuan Dimensi Geotekstil Tube (Geotube) Sebagai Struktur Pelindung Pantai. *Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan*, 10(2), pp.233-42.
- Satriadi, A., Subardjo, P., Saputra, S. & Hariadi, H.D., 2013. Geologi Resen Daerah Pantai Antara Sungai Pekalongan Hingga Sungai Klidang, Jawa Tengah. *Buletin Oseanografi Marina*, April. pp.24 -34.
- Setiady, D., Geurhaneu, N. & Usman, E., 2010. Proses Sedimentasi dan Erosi dan Pengaruhnya Terhadap Pelabuhan Sepanjang Pantai Bagian Barat dan Bagian Timur, Selat Bali. *Jurnal Geologi Kelautan*, Agustus. pp.85-94.
- Setiyono, H., Cahyanto, N.P. & Indrayanti, E., 2014. Studi Profil Pantai di Pulau Parang Kepulauan Karimunjawa Jepara. *Jurnal Oseanografi*, 3(2), pp.161-66.
- Selo, S. (2009). Perubahan Sosial di Yogyakarta. Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu. Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Triatmodjo, B., 2012. Perencanaan Bangunan Pantai. Yogyakarta: Beta Offset.

Yuwono, N., 2016. Teknik Survey Hidrografi. Yogyakarta: PUSTRAL.